

BAB I

PENDAHULUAN

Illegal logging telah menimbulkan multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu fungsi produksi, fungsi lingkungan serta fungsi sosial.

Dampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan Tahun 2005 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya. Data terbaru dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah kehilangan Rp. 8,3 miliar per hari akibat illegal logging.

Berdasarkan press release dari Departemen Kehutanan pada tanggal 15 Januari 2005 bahwa kayu-kayu yang diseludupkan dari Kalimantan, Papua, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 10 juta hektar per tahun, ~~sedangkan~~ penebangan dan peredaran kayu secara liar dalam negeri mencapai 50,7 ~~juta~~ meter kubik per tahun, dengan perkiraan kerugian finansial yang ditanggung oleh

negara sebesar Rp. 30.42 triliun per tahun.

Hutan juga merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup global. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan.

Penebangan hutan secara liar atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* selain memberikan kerugian kepada keuangan pemerintah juga dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir, rusaknya ekosistem kehidupan sehingga selain merugikan masyarakat secara luas juga merugikan hewan yang hidup di dalam hutan. Oleh sebab itu hal-hal yang mengakibatkan kerugian tersebut khususnya kepada masyarakat harus ditelaah sebagai suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.